



GUBERNUR GORONTALO  
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 277 / 02/ VII / 2013

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012-2017

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  4. Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010;
  5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah :
1. acuan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan;
  2. acuan dalam menyusun dokumen penetapan kinerja;
  3. acuan dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja
  4. acuan dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017.

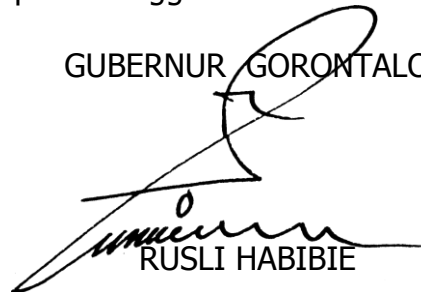
5. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi secara baik dan berkualitas.
6. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
7. acuan dalam menyusun perencanaan jangka menengah atau rencana strategis SKPD; dan
8. evaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah.

KETIGA : Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan evaluasi dari setiap indikator yang ditetapkan dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja serta bertanggungjawab dan menyampaikan Laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 19 JULI 2013

GUBERNUR GORONTALO



RUSLI HABIBIE

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Provinsi Gorontalo
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo
3. Yth. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
4. Masing-masing yang bersangkutan



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : **277 / 02 / VII / 2013**

TANGGAL : **19 JULI 2013**

TENTANG : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012-2017**

**Indikator Kinerja Utama Provinsi Gorontalo  
Tahun 2012-2017**

<b>Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah</b>		
<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Sumber Data</b>
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	- BPS - Bappeda
	PDRB per Kapita	- BPS - Bappeda
	Inflasi	- BI - BPS - Bappeda
	IPM	- BPS - Bappeda
Terciptanya laju Investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA dan PMDN)	Badan Investasi Daerah
	Jumlah Investor berskala nasional (PMA dan PMDN)	Badan Investasi Daerah
Meningkatkan Kinerja Ekspor Komoditi Unggulan Daerah	Peningkatan Realisasi Investasi masyarakat/swasta murni	Badan Investasi Daerah
	Fasilitasi penerbitan SKA produk ekspor daerah	Dinas Koperindag
	Perkembangan ekspor	Dinas Koperindag
	Jumlah perdagangan antar pulau	- Dinas Koperindag - Dinas Perhubungan

Terwujudnya Pertumbuhan Usaha Koperasi dan UKM	Meningkatnya jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berdaya Saing	Dinas Koperindag
Peningkatan Lapangan Kerja	Presentase Angka pengangguran terbuka	- BPS - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	- BPS - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan norma kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Tujuan 2 : Menyediakan Infrastruktur untuk Percepatan Pembangunan Daerah**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Sumber Data</b>
Meningkatnya Infrastruktur Daerah	Terpeliharanya Infrastruktur Irigasi sehingga dapat memperpanjang umur rencana dari bangunan Irigasi	Dinas PU
	Terkendalinya erosi dan sedimentasi pada tebing-tebing dan badan sungai	Dinas PU
	Tersedianya jembatan di ruas jalan provinsi yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota	Dinas PU
	Tersedianya jembatan Strategis provinsi yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota	Dinas PU

	Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan Provinsi yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota	Dinas PU
	Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar yang layak	- Dinas PU - Dinas Kesehatan
	Peningkatan produktivitas bongkar muat di pelabuhan se-Provinsi Gorontalo	Dinas Perhubungan & Pariwisata
	Peningkatan kapasitas layanan kapal dipelabuhan anggrek	Dinas Perhubungan & Pariwisata

### **Tunuan 3 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Sumber Data</b>
Memfasilitasi PAUD bagi seluruh anak Usia Dini	Persentase APK TK/PAUD	Dinas Dikpora
Memfasilitasi Wajib Belajar 12 tahun dan Paket A,B dan C	Angka Melek HURuf	Dinas Dikpora
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Persentase APK SD/MI	Dinas Dikpora
	Persentase APM SMP/MTs/Paket B	Dinas Dikpora
	Persentase APK SMP/MTs	Dinas Dikpora
	Persentase APK SMA/MA/SMK	Dinas Dikpora
	Persentase APM SMA/MA/SMK/ Paket C	Dinas Dikpora



	Jumlah Guru yang memenuhi S1/D4	Dinas Dikpora
Mengembangkan Pendidikan Non Formal	Rata-rata lama sekolah : - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK	Dinas Dikpora
	Angka Purus Sekolah dan Angka Melanjutkan Angka Putus Sekolah: - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK Angka Melanjutkan : - SD/MI ke SMP/MTs - SMP/MTS ke SMA/MA/SMK	Dinas Dikpora
	Penuntasan buta aksara	Dinas Dikpora

#### **Tujuan 4 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Sumber Data</b>
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Rasio dokter umum per satuan penduduk	Dina Kesehatan
	Rasio bidan per satuan penduduk	Dina Kesehatan
	Rasio perawat per satuan penduduk	Dina Kesehatan

	Rasio Apoteker per satuan penduduk	Dina Kesehatan
	Rasio tenaga kesmas per satuan penduduk	Dina Kesehatan
Terbangunnya Infrastruktur Kesehatan Sampai ke Tingkat Desa	Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)	Dina Kesehatan
	Menurunnya Angka Kematian bayi (AKB)	Dina Kesehatan
Terwujudnya Akses layanan Kesehatan Masyarakat melalui Jamkesda dan Jamkesmas	Prevalensi gizi kurang	Dina Kesehatan
	Meningkatnya Umur Harapan Hidup	Dina Kesehatan

**Tujuan 5 : Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk Kemakmuran Masyarakat**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Sumber Data</b>
Meningkatnya Produktivitas Hasil Pertanian dan Perikanan	Meningkatnya jumlah produksi perikanan tangkap	Dinas Perikanan
	Meningkatnya pendapatan rata-rata nelayan	Dinas Perikanan
	Meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya	Dinas Perikanan
	Meningkatnya pendapatan rata-rata pembudidaya	Dinas Perikanan
	Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTN-P)	- Dinas Perikanan - BPS
	Jumlah Desa nelayan yang tersentuh program PDNT	Dinas Perikanan
	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditi Utama Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Pertanian
Terwujudnya Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Bidang Pertanian dan Perikanan	Jumlah kawasan strategis cepat tumbuh	Bappeda
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam	Pertambangan tanpa izin yang dibina	Dinas Kehutanan

Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Luas wilayah rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Dinas Kehutanan
	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan	-BadanLingkungan Hidup, Riset dan Teknologi -BPS
	Persentase peningkatan tingkat ketaatan pemrakarsa terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan	BadanLingkungan Hidup, Riset dan Teknologi
Peningkatan Pemeliharaan Obyek-obyek Wisata	Tersedianya fasilitas penunjang obyek wisata unggulan di Kab/Kota	Dinas Perhubungan dan Pariwisata
	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di 8 obyek wisata unggulan.	Dinas Perhubungan dan Pariwisata
	Peningkatan lama tinggal	Dinas Perhubungan dan Pariwisata

**Tujuan 6 : Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Individu, Keluarga, Kelompok dan Masyarakat Khususnya PMKS dalam Memenuhi Kebutuhan Dasarnya	Jumlah tuna sosial penerima bantuan stimulan UEP	Dinas Sosial
	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan Sosial	Dinas Sosial
	Jumlah Penyandang cacat yang menerima bantuan stimulan UEP	Dinas Sosial
	Jumlah lanjut usia penerima bantuan stimulant UEP	Dinas Sosial

**Tujuan 7 : Memelihara Keragaman Agama dan Budaya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah	Jumlah pagelaran budaya	Dinas Dikpora
	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan festival seni dan budaya	Dinas Dikpora

### Tujuan 8 : Meningkatkan Peran Perempuan dan Kualitas Hidup Anak

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Nilai Indikator Kualitas Hidup Perempuan	Indeks pembangunan gender	- Biro PP Kesra - BPS
	Indeks pemberdayaan gender	- Biro PP Kesra - BPS
Menurunnya Angka Tindak Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak	Rasio KDRT	Biro PP Kesra
	Persentase menurunnya pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak	Biro PP Kesra
	Kota layak anak	- Dinas Dikpora - Biro PP Kesra

### Tujuan 9 : Mengembangkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

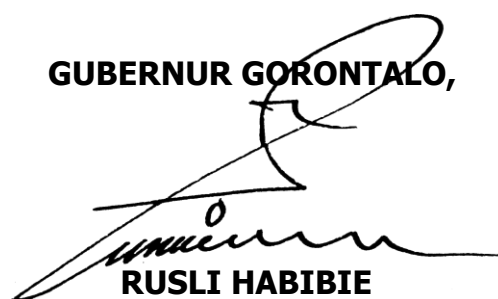
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan pada Masyarakat	Presentase SKPD yang menerapkan pengelolaan keuangan secara terintegrasi, akuntabel, transparan dan tepat waktu	- BKD - Inspektorat
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Provinsi Gorontalo	Persentase PNS yang diangkat dalam Jabatan Struktural dan Fungsional di Provinsi Gorontalo	BKPAD
	Terlaksananya diklat PNS tepat syarat	BKPAD
	Jumlah LSM/Orkemas yang mendapatkan penguatan dan pendataan	Badan Kesbang & Politik
	Jumlah kasus hukum terkait pemerintahan terfasilitasi	Biro Hukum & Organisasi

### Tujuan 10 : Pengentasan Kemiskinan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
Terwujudnya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Miskin	Jumlah Fasilitasi penyaluran KUR	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

	Jumlah wira usaha baru yang difasilitasi oleh modal usaha	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Berkurangnya Presentase Masyarakat Miskin	Jumlah Rumah layak huni yang dibangun bagi RTSM	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa & PK
	Presentase penduduk miskin/pra sejahtera di Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bappeda</li> <li>- Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa &amp; PK</li> <li>- BPS</li> </ul>

**GUBERNUR GORONTALO,**



**RUSLI HABIBIE**